



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : RUSYDIANA
NIK : 3578024712660002
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA SURABAYA
Jabatan : HAKIM
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 5 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUSYDIANA
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 60188

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.605.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/36 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/256 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 2.460.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 481.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOBIL, NISSAN LIVINA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
4. MOBIL, MITSUBISHI X PANDER CROOS MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 87.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.173.500.000

III. HUTANG Rp. 260.547.986

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.912.952.014



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Fw: Bukti Penerimaan SPT Tahunan...

AA



REPUBLIK INDONESIA

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021)
1500200 informasi@pajak.go.id
pengaduan@pajak.go.id

**BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK
(BPE)**

Nomor BPE : **BPE-26940/CT/KPP
.1107/2026**
Tanggal : 23 Februari 2026
NPWP : 3578020210620003
Nama Wajib Pajak : AGUS ADITONI,DRS,M.AG
Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi
Tahun Pajak : 2025
Masa Pajak : Januari - Desember 2025
Status SPT : Pembetulan
Saluran : Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT : 23 Februari 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh
Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan
Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

*Terima kasih telah menggunakan layanan
digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan
diterima dengan baik.*

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.



Delete



Reply



Forward



Move



More